

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan secara global masih menjadi masalah yang cukup serius dan menyita perhatian. Menurunkan angka kemiskinan sudah menjadi rencana dan prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen atau setara dengan 23,85 juta penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2025). Angka ini merupakan yang terendah dalam dua decade terakhir dan menurun 0,10 poin persen dari September 2024 yang sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang. Penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,21 juta orang ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 1. 1 Grafik Kemiskinan di Indonesia tahun 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam grafik di atas, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami *trend* penurunan yang signifikan pada setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 yaitu sebesar 23,85 juta orang, turun sebanyak 1,37 juta orang terhadap Maret 2024. Berada pada presentase 8,47%, menurun 0,56% terhadap periode Maret tahun 2024 lalu.

Terdapat perbedaan terkait jumlah persentase penduduk miskin antara di kota dan di desa. Trend penurunan terjadi di pedesaan di mana pada Maret 2025 sebesar 11,03%⁵ turun dibandingkan September 2024 yang sebesar 11,34%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perkotaan justru cenderung meningkat, pada Maret 2025 sebesar 6,73% naik dibandingkan September 2024 yaitu sebesar 6,66%. Data ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang melibatkan 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada Februari 2025. Perbedaan tingkat kemiskinan yang terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan ini dipengaruhi oleh faktor urbanisasi dan akses pekerjaan yang lebih baik di pedesaan hasil program infrastruktur. Meski demikian, disparitas ini tetap menjadi tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan nasional.

Garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp 20.305 per harinya, naik sekitar 2,34% dari periode sebelumnya. Penduduk dianggap miskin jika pengeluaran bulanan mereka berada di bawah batas ini, yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan dasar. Penetapan ini menjadi dasar pemerintah untuk menargetkan bantuan tepat sasaran.

Meskipun demikian, penurunan angkaiskinan di Indonesia ini tidak diimbangi oleh kesejahteraan masyarakatnya.

Kemiskinan secara eksplisit termasuk ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) nomor 1 yaitu Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*). Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dan menjadi tulang punggung agenda SDGs karena kemiskinan multidimensi masih menjadi masalah global. Targetnya yaitu berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang memiliki pendapatan di bawah standar nasional, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. SDGs 1 ini diterjemahkan melalui program pengentasan kemiskinan seperti jaminan sosial dan peningkatan akses kebutuhan dasar. Tujuan ini melengkapi MDGs sebelumnya dan menjadi prioritas Bappenas untuk pembangunan inklusif. Kemiskinan diukur melalui indikator seperti proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan nasional.



Gambar 1. 2 Infografik 17 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sumber: Website Sustainable Development, 2025

Angka kemiskinan tertinggi yang pernah ada di Indonesia tercatat pada tahun 2020 yaitu ada di angka 9,78% dari yang sebelumnya berada pada 9,41% di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh anomaly yang terjadi di tahun 2020 yang di mana Indonesia harus menghadapi dampak ekstrem dari Covid-19, sehingga mengakibatkan lonjakan angka kemiskinan di seluruh penjuru kota di Indonesia. Kondisi ini menempatkan banyak penduduk pada posisi rentan miskin yang kembali jatuh miskin dan diperkirakan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi selama 1-2 tahun mendatang. Hal ini tentu menambah beban pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah terus melakukan upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang direalisasikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini diterbitkan pada 7 Maret 2025 dan bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah di Indoneisa melalui program yang terpadu dan sinergi, serta melalui kerja sama antar stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat.

Penanggulangan kemiskinan selama ini berfokus pada konsep kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanna yang diukur dari sisi pengeluaran pendapatan. Jadi, definisi “penduduk miskin” adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan konsep tersebut menandakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yaitu dengan mendorong peningkatan pendapatan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

Ketimpangan pembangunan ekonomi berdampak pada parahnya kesenjangan dan kemiskinan, di mana banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada penduduk miskin (Syawie, 2011). Hal ini berkaitan erat dengan kegagalan sebagian besar program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan akibat terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan (Prawoto, 2009). Sementara terkait pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan optimal dalam mengentaskan tingginya angka masyarakat miskin karena desain program yang kurang tajam (Sutikno, 2020).

Kota Semarang menjadi salah satu kota yang menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan. Kepadatan penduduk di Kota Semarang akibat dampak urbanisasi menyebabkan tingginya angka kemiskinan di kota tersebut. Namun menurut data BPS Kota Semarang, tingkat kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2025 mencapai 3,80% dan merupakan angka terendah sepanjang periode 2015-2025 (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025). Jumlah penduduk miskin berjumlah 74,36 ribu orang, menurun dari 4,03% atau sekitar 77,79 ribu orang pada tahun 2024. Penurunan ini setara dengan 3,43 ribu orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dalam satu tahun.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kota Semarang pada 24 Setember 2025 melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional, terdapat penurunan sebebsar 0,23% karena didukung dengan adanya perbaikan signifikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,59 menjadi 0,41 yang menandakan pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami trend penurunan dari 0,12 menjadi 0,05, yang mengindikasikan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit. Capaian ini menjadikan Kota Semarang sebagai contoh sukses pengentasan kemiskinan di tingkat kota di Jawa Tengah.



Gambar 1. 3 Profil Penurunan Kemiskinan Kota Semarang 2025

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2025

Berdasarkan keterangan gambar di atas, maka diketahui bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan yang konsisten dilihat dari rigid angka yang berada pada 4,56% di tahun 2021 hingga berhasil mencapai angka 3,80% pada tahun 2025 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa program penurunan kemiskinan yang dijalankan

oleh Pemerintah Kota Semarang cukup memberikan dampak yang signifikan bagi penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah Kota Semarang bermaksud mengentas kemiskinan melalui program “Gerbang Hebat” atau akronim dari “Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui Harmonisasi Edukasi Ekonomi, Ekosistem, dan Etos Bersama Masyarakat”, yang kemudian diimplementasikan dengan program kampung tematik ini. Kampung tematik dirancang dibawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Dengan program kampung tematik ini menjadi upaya pemberdayaan masyarakat (Syarifa N. H & Wijaya A, 2019). Kampung Tematik di Kota Semarang ini di design sebagai salah satu *pilot project* untuk penataan infrastruktur wilayah serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Harapannya dengan program Kampung Tematik ini akan membentuk kemandirian masyarakat untuk dapat melanjutkan program pemerintah ini dengan baik.

Pelaksanaan kampung tematik di Kota Semarang di dasarkan pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kampung Tematik. Dijelaskan di dalamnya bahwa kampung tematik ini merupakan suatu wilayah pemukiman dibawah administrasi kelurahan yang menunjukkan identitasnya melalui suatu potensi masyarakat atau wilayahnya berdasarkan kesepakatan bersama. Kloczko Gajewska (2014) mendefinisikan kampung tematik atau desa tematik sebagai suatu wilayah yang dikembangkan oleh masyarakat setempatnya berdasarkan ciri khas wilayah tersebut sehingga udah dikenali sebagai

suatu identitas. Tujuan dari kampung tematik ini sendiri adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di suatu wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan, serta menambah tujuan atau destinasi wisata di suatu daerah. Kampung tematik ini biasanya identik dengan adanya hiasan berupa gambar mural pada tiap rumah di permukiman tersebut (Sukowati, 2022).

Konsep Kampung Tematik ditujukan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Semarang. Secara nyata, program ini didasarkan pada pemberdayaan masyarakat lokal dengan beberapa desain kegiatan yang dilakukan seperti perbaikan fisik seperti peningkatan infrastruktur jalan, saluran pembuangan, dan penghijauan wilayah yang intensif. Selain itu, Kampung Tematik juga mengangkat potensi sosial dan ekonomi lokal dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga tercipta identitas dan karakteristik khas yang menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga setempat.

Pemberlakuan program kampung tematik yang ditujukan sebagai program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang ini lebih efektif daripada bantuan tunai semata karena melibatkan partisipasi aktif warga dalam menggali asset lokal seperti seni, kerajinan, atau agrowisata, sehingga menciptakan *multiplier effect* pada perekonomian wilayah. Program kampung tematik ini di desain untuk dapat menangani kemiskinan multidimensional, sehingga bukan hanya perbaikan finansial tetapi juga akses terhadap kebutuhan dasar dan infrastruktur. Berakar dari usulan masyarakat membuktikan bahwa pendekatan *bottom-up* lebih adaptif terhadap kondisi lokal dibandingkan program yang bersifat *top-down*.

Sejak tahun 2016, sudah ada sekitar 260 kampung tematik yang tersebar di 177 kelurahan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan dana Rp 200 juta untuk setiap kampungnya. Terakhir, pada tahun 2022, Pemerintah Kota Semarang menambah 10 kampung tematik baru (Agus AP, 2022). Dilansir dari website resmi kampungtematik.semarangkota.go.id (*Data Kampung Tematik, n.d.*) terdapat 10 Kampung Tematik Unggulan di Kota Semarang diantaranya Kampung Batik Rejomulyo, Kampung Ijo, Kampung Jajan Pasar Gajahmungkur, Kampung Sego (Segala Olahan) Angkringan, Kampung Alam Malon, Kampung Bakul Gilo Gabahan Semarang Tengah, Kampung Tematik Bonsai, Kampung Tematik Konveksi, Kampung Petis dan Mangut Tambakharjo, dan Kampung Tematik Misoa (Mie, Doto, Ayam). Namun, kesepuluh Kampung Tematik Unggulan tersebut bukanlah fokus dalam penelitian ini, melainkan Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah yang menjadi salah satu kampung tematik yang terdaftar sejak tahun 2016 atau sejak tahun pertama program kampung tematik ini dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Pemilihan Semarang Selatan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kondisi wilayahnya yang merupakan salah satu kecamatan dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata yang cukup aktif di Kota Semarang. Dinamika kegiatan ekonomi masyarakat serta keberadaan berbagai potensi wisata menjadikan wilayah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sementara itu, Kampung Tematik Gumregah Lamper Tengah dipilih karena merupakan satu-satunya kampung tematik yang dibentuk pada tahun 2016 di wilayah tersebut dan masih mampu mempertahankan aktivitas ekonominya hingga saat ini. Keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat

di kampung tematik ini menunjukkan adanya potensi pemberdayaan masyarakat yang menarik untuk diteliti.

Tabel 1. 1 Daftar Lokasi Penempatan Kampung Tematik Tahun 2016

No	Kecamatan	Lokasi	Kelurahan	Nama Tematik
1	Semarang Tengah	RT 02, 03 RW 03	Miroto	Miroto Paru-parune Kutho
2	Semarang Tengah	RT 01, 02, 03 RW 01	Kranggan	Kampung Lunpia
3	Semarang Utara	RT 02 RW 09	Kuningan	Kampung Sehat Ramah Anak
4	Semarang Utara	RT 01, 02, 03, 04, 05 RW 05	Tanjung Mas	Kampung Hidroponik
5	Semarang Selatan	Jl. Lamper Tengah VIII RW 07	Lamper Tengah	Kampung Tahu Tempe Gumregah
6	Semarang Selatan	RT 04, 06 RW 07	Pleburon	Kampung Jahe
7	Semarang Timur	RT 02 RW 02	Rejomulyo	Kampung Batik
8	Semarang Timur	RT 06 RW 05	Mlatiharjo	Kampung Ciliwung Gumregah
9	Semarang Barat	RT 03, 04 RW 07	Krapyak	Kampung Agro
10	Semarang Barat	RW 08	Gisikdrono	Kampung Pelayanan
11	Ngaliyan	RT 01 RW 11	Purwoyoso	Kampung Serasi Berimbang
12	Ngaliyan	RT 06 RW 13	Bringin	Kampung Bringin Berseri
13	Tugu	RT 01, 02 RW 05	Mangunharjo	Kampung Mangut
14	Tugu	RW 03	Tugurejo	Kampung Keset Perca
15	Mijen	RT 06 RW 07	Mijen	Kampung Anggrek
16	Mijen	RT 02 RW 10	Wonolopo	Kampung Jamu
17	Genuk	RW 03	Bangetayu Kulon	Kampung Jajan Pasar
18	Genuk	RW 05	Bangetayu Wetan	Kampung Bebas Jentik
19	Pedurungan	RT 02, 11 RW 09	Palebon	Kampung Seni
20	Pedurungan	Jl. Tegalegi RT 06 RW 03	Tlogomulyo	Kampung Sari Mulyo

No	Kecamatan	Lokasi	Kelurahan	Nama Tematik
21	Gayamsari	RT 05, 08, 09 RW 03	Gayamsari	Kampung Kreatif
22	Gayamsari	Jl. Purwosari 4 RT 05 RW 03	Tambakrejo	Kampung Sentra Bandeng
23	Tembalang	RW 02	Tandang	Kampung Ramah Lingkungan
24	Tembalang	RT 07 RW 02	Sendangmulyo	Kampung Bunga Ronce
25	Banyumanik	RW 08	Pudakpayung	Kampung Jajan Pasar
26	Banyumanik	RT 05 RW 10	Gedawang	Kampung Susu Perah
27	Gunungpati	RW 06	Gunungpati	Kampung Alam Malon
28	Gunungpati	Kalialang Lama VII RT 02 RW 01	Sukorejo	Kampung Jawi
29	Gajahmungkur	Jl. Lempongsari Raya RT 03/RW 04	Lempongsari	Kampung Beliksari
30	Gajahmungkur	Jl. Tugu Suharto RT 06/RW 04	Bendan Dhuwur	Kampung Kamsoli
31	Candisari	RT 04, 07, 10 RW 05	Karanganyar Gunung	Kampung Home Industri
32	Candisari	RW 06	Wonotingal	Kampung Organik

Sumber: Website Kampung Tematik Kota Semarang (2022)

Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah ini berlokasi di wilayah RW 7 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Ditetapkannya kampung tematik tahu tempe di wilayah RW 7 ini didasari oleh potensi wilayah di RW 7 yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pengrajin tahu dan tempe, sehingga kemudian diajukan menjadi sebuah kampung tematik. Dikutip dari website resmi kecsmgselatan.semarangkota.go.id (Kampung Tematik Gumregah Lamper Tengah, n.d.), tujuan dibentuknya kampung tematik tahu tempe di wilayah ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan

baru bagi ibu-ibu rumah tangga disekitarnya dan sebagai salah satu upaya penataan lingkungan yang lebih asri, hijau, bersih, dan sehat.

Bukan tanpa alasan dan indicator yang tidak jelas, kampung tahu tempe Gumregah ini ditetapkan menjadi kampung tematik oleh Bappeda Kota Semarang, melainkan karena karakteristik berwirausaha para pelaku usaha tahu tempe disini yang cukup baik. Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah ini memiliki karakteristik pengelolaan usaha yang relatif lebih maju dibandingkan sentra tahu tempe lainnya. Sebagian pelaku usaha di kampung ini menggunakan kedelai impor yang didatangkan dari Tiongkok serta menerapkan sistem pengolahan bahan baku yang lebih detail, seperti proses pembersihan kedelai hingga benar-benar bersih dan pengupasan kulit kedelai sebelum diolah. Proses tersebut berimplikasi pada kualitas produk yang dihasilkan, di mana tempe memiliki daya tahan yang lebih lama dan kualitas yang lebih stabil. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya peningkatan mutu produksi yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.

Selain itu, Kampung Tematik Tahu Tempe menunjukkan tingkat keterbukaan yang tinggi terhadap kegiatan penelitian. Pelaku usaha memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan kunjungan langsung serta uji coba pada proses pembuatan tahu dan tempe di lokasi produksi. Keterbukaan ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang lebih mendalam terkait proses produksi, pengelolaan usaha, serta praktik yang diterapkan di lapangan, sehingga meningkatkan validitas dan kedalaman analisis penelitian.

Dari aspek pengelolaan lingkungan, kampung ini juga memiliki keunggulan melalui penerapan sistem saluran pembuangan limbah cair yang didesain dengan

penyaringan berlapis. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi dampak limbah hasil produksi terhadap lingkungan sekitar. Selain limbah cair, limbah padat hasil produksi tahu dan tempe tidak sepenuhnya dibuang, melainkan dimanfaatkan kembali sebagai bahan tambahan pakan ternak. Pemanfaatan limbah padat tersebut dilakukan melalui kemitraan dengan peternak sapi dan kambing, sehingga menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan sekaligus mendukung prinsip pengelolaan usaha yang lebih berkelanjutan.

Di sisi kelembagaan, Kampung Tematik Tahu Tempe masih memiliki paguyuban pelaku usaha yang bertahan dan berfungsi, baik secara struktural maupun operasional. Keberadaan paguyuban ini menjadi wadah koordinasi, komunikasi, serta penguatan solidaritas antar pelaku usaha, sekaligus berperan sebagai aktor lokal dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi di kampung tersebut. Kondisi ini membedakan Kampung Tematik Tahu Tempe dari kampung tematik lain yang cenderung mengalami pelemahan kelembagaan setelah program berjalan.

Berdasarkan keterangan dari Pak Daryo (45 tahun) selaku salah satu pengrajin di sentral tahu tempe RW 7, pada awal ditetapkannya menjadi kampung tematik tahu tempe ini, Pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan dana sebesar Rp 200 juta yang diperuntukkan untuk perbaikan wilayah seperti pembuatan tembok mural dan penghijauan. Selain itu, alokasi dana tersebut juga dipergunakan untuk pembuatan gapura yang bertuliskan Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah, sebagai penanda kampung tematik di wilayah RW 7 tersebut. Namun, selain suntikan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang

melalui Bappeda ini, Pak Daryo juga menyampaikan bahwa belum adanya bantuan sponsor yang masuk dari pihak swasta, tetapi lebih sering mendapat tawaran peminjaman KUR dari beberapa bank.

Pembentukan kampung tematik di wilayah RW 7 kelurahan Lamper Tengah ini masih banyak menghadapi kendala. Berdasarkan keterangan dari Chandra (20 tahun) kurangnya partisipasi aktif dari pihak pemerintah untuk memberikan pelatihan dan dukungan terhadap usaha yang dikembangkan di kampung ini yaitu tahu tempe. Pemberdayaan yang ada banyak datang dari pihak akademisi yaitu melalui kegiatan penelitian dan kuliah kerja nyata dengan wilayah RW 7 ini menjadi mitranya. Selain itu, masih belum adanya desain keberlanjutan yang jelas dari program ini, sehingga setelah dilakukan perbaikan infrastruktur wilayah dan penambahan gang sebagai bentuk *labelling* kampung tematik di daerah tersebut, maka ditahun-tahun berikutnya program tersebut tidak berkelanjutan. Akibat tidak adanya kelompok usaha ini, para pengusaha tahu dan tempe yang ada di wilayah RW 7 ini mengembangkan usahanya secara mandiri. Pengelolaan infrastuktur juga tidak dilakukan dengan baik oleh pemangku kepentingan setempat, sehingga tidak adanya upaya perbaikan yang dilakukan untuk menjaga keindahan kampung seperti pada saat awal program dimulai.

Wilayah RW 7 ini berada dipusat kota yang padat penduduk dimana disekitarnya dikelilingi banyak pedagang umkm serta banyak juga pengusaha tahu tempe diluar kampung tematik tahu tempe gumregah ini. Berdasarkan keterangan Pak Daryo (45 tahun) pengrajin tahu yang tersisa di kampung tematik tersebut hanya tersisa beliau. Jumlahnya lebih banyak pengrajin tempe di wilayah RW 7 ini.

Hal ini menimbulkan kesenjangan antara konsep kampung tematik dimana idealnya peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Wilayah RW 7 Kelurahan Lamper Tengah, Semarang Selatan ini resmi ditetapkan sebagai salah satu kampung tematik sejak tahun 2016 dengan tema kampung produksi tahu tempe yang kini kian dikenal dengan sebutan Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah. Namun apakah peningkatan pendapatan yang dirasakan tersebut merupakan hasil dari intervensi program kampung tematik yang ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana program kampung tematik efektif dan mampu mencapai tujuannya, dengan mengambil salah satu lokus di salah satu kampung tematik yang berorientasi pada potensi ekonomi

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tentang kampung tematik, lebih banyak membahas terkait pemberdayaan masyarakat dalam kampung tematik tersebut. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas bagaimana kampung tematik dalam mendorong peningkatan perekonomian sebagai tujuan ekonominya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas bagaimana program kampung tematik ini dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga dapat diketahui kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah intervensi program. Kemudian untuk mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada 10 kampung tematik unggulan, maka penelitian tentang kampung tematik kali ini akan memperdalam pembahasan terkait bagaimana program kampung tematik dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dengan mengambil lokus di Kampung Tematik Tahu

Tempe Gumregah Kota Semarang. Hal ini juga sebagai pembeda terkait bagaimana pelaksanaan program kampung tematik di kampung yang berkelanjutan dan tidak.

Studi terkait peningkatan pendapatan masyarakat seperti pada penelitian yang berjudul “Pengembangan Kawasan Kampung Pelangi Semarang Persepsi dan Dukungan Masyarakat” oleh STIEPARI Semarang menjabarkan dengan analisis data numerik yang diolah dengan metode statistik. Kemudian pada penelitian ini, penulis akan membahas menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana penelitian ini hanya mendeskripsikan berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan pihak terkait. Kebaharuan lain pada penelitian ini adalah, beberapa peneliti terdahulu yang membahas tentang kampung tematik lebih sering mengambil lokus di kampung tematik unggulan, sedangkan pada penelitian ini lokus yang diambil bukan termasuk ke dalam 10 kampung tematik unggulan di Kota Semarang. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana program Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah di Kecamatan Semarang Selatan dalam mendorong peningkatan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat bahwa penurunan kemiskinan di Kota Semarang tidak diimbangi oleh adanya kesejahteraan, sehingga perlu kajian terkait program yang dijalankan. Penelitian ini berfokus pada program Kampung Tematik sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Meskipun program ini telah berjalan sejak 2016 dan berhasil menciptakan perbaikan fisik seperti jalan lingkungan, saluran air, dan penghijauan, pencapaian pengentasan kemiskinan secara merata belum optimal karena keterbatasan sumber daya, kurangnya tempat pemasaran bersama, serta

partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Data dari Bappeda Kota Semarang tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 269 kampung tematik yang tersebar di seluruh kelurahan, namun efektivitas program dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat masih perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna mengevaluasi secara kualitatif perubahan kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan program, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan potensi solusi yang dapat memperkuat keberlanjutan dan dampak positif program Kampung Tematik sebagai solusi strategis dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

Penelitian ini akan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn sebagai kerangka analisis utama. Dalam konteks evaluasi program Kampung Tematik Gumregah Tahu Tempe, teori Dunn akan digunakan untuk menilai sejauh mana program ini efektif dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan memperbaiki kondisi permukiman kumuh. Evaluasi akan mencakup aspek efektivitas program dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi, efisiensi penggunaan sumber daya, kecukupan intervensi terhadap kebutuhan masyarakat, pemerataan manfaat di seluruh kelompok masyarakat, responsivitas program terhadap kebutuhan lokal, serta ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan teori evaluasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang keberhasilan dan kendala program serta rekomendasi perbaikan yang berbasis data dan analisis yang sistematis.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi program kampung tematik dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah, Kota Semarang?
2. Apa saja aspek pendukung dan penghambat dari keberjalanan program kampung tematik dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah, Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan evaluasi program kampung tematik dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah, Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan apa saja aspek pendukung dan penghambat dari keberjalanan program kampung tematik dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah, Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai evaluasi program kampung tematik dalam dalam pencapaian tujuannya. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi masyarakat umum tentang bagaimana kebijakan publik berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

2. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kota Semarang dalam merumuskan, mengembangkan, dan memperbaiki kebijakan. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan serupa di daerah lain, serta memperkuat pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.

3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik terkait evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini juga membuka peluang pengembangan kajian lanjutan, seperti analisis efektivitas jangka panjang program atau studi komparatif antar kota.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 *State of The Art*

Tabel 1. 2 *State of The Art*

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1.	Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Sebagai Penanganan Kumuh Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Ananto Hernandi Eko Cahyono, Amirul Mustofa (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif program Kotaku telah mengatasi masalah daerah kumuh di Jiwan. Ini melibatkan pengukuran keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan dan meningkatkan kondisi kehidupan penduduk	Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan kualitatif, memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengevaluasi dampak program Kotaku terhadap daerah kumuh di Jiwan.	Teori Evaluasi Dampak menurut Anderson, yaitu: 1. Dampak yang diharapkan dari program terhadap masyarakat. 2. Dampak tak terduga yang mungkin timbul dari implementasi program.	Sementara program Kotaku menunjukkan potensi dalam memperbaiki kondisi kumuh dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, pelaksanaannya secara keseluruhan mengungkapkan area yang signifikan untuk perbaikan. Evaluasi dan adaptasi berkelanjutan	Mengidentifikasi program yang berbeda yaitu terkait program kampung tematik yang masih jarang diteliti oleh banyak peneliti.

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
					terkait komunikasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program dan mencapai tujuannya di masa depan.	
2.	Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dikelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Rovi Octavia (2022)	Penelitian ini berfungsi untuk memberikan evaluasi komprehensif dampak program Kotaku terhadap permukiman kumuh di Desa Duri Barat, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, kesejahteraan	Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang pengalaman dan persepsi masyarakat mengenai	Teori Evaluasi Dampak menurut Anderson, yaitu: 1. Dampak yang diharapkan dari program terhadap masyarakat. 2. Dampak tak terduga yang mungkin timbul dari implementasi program.	Pelaksanaan program KOTAKU di wilayah ini masih banyak menghadapi banyak kendala. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan kolaborasi stakeholder menjadi salah satu faktor	Mengidentifikasi program yang berbeda yaitu terkait program kampung tematik yang masih jarang diteliti oleh banyak peneliti.

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
		masyarakat, dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya.	program Kotaku. Metode ini cocok untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan mengumpulkan data yang kaya dan terperinci.		penghambat dalam program ini.	
3.	Evaluasi Dampak Program Kampung Produktif di Kota Sawahlunto: Studi pada Dusun Kayu Gadang Ria Dwi Anggraini (2019)	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh Program Kampung Produktif di Dusun Kayu Gadang, Kota Sawahlunto,	Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Pemilihan	Penelitian ini mengacu pada model evaluasi "after only" dengan menggunakan indikator dampak ekonomi yang dikembangkan oleh Finsterbusch dan Motz.	Hasil temuan menunjukkan bahwa Program Kampung Produktif di Dusun Kayu Gadang belum memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan	Perbedaan teori yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi dari William Dunn (2003).

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
		khususnya pada tahun 2014.	informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu melibatkan warga Dusun Kayu Gadang yang menerima bantuan dari program tersebut. Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, dengan individu sebagai unit analisisnya.		oleh sifat bantuan yang hanya sementara karena adanya batas waktu bagi setiap wilayah yang ditetapkan sebagai Kampung Produktif. Meski begitu, program ini memberikan dampak pada beberapa aspek, seperti pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan, lingkungan hidup, ketersediaan barang dan jasa, serta kepuasan kerja.	

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
4.	Evaluasi Dampak Program Bantuan Air Bersih Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Cyntia Agatha (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan program bantuan air bersih di Desa Puser, Kabupaten Serang, sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait akses terhadap air bersih.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan beberapa pihak, termasuk masyarakat Desa Puser, aparat Pemerintah Desa, serta pejabat dari Dinas Permukiman Kabupaten Serang yang terkait dengan	Peneliti menggunakan teori evaluasi dampak dari Samoedra Wibawa, yang mencakup empat dimensi evaluasi, yaitu: 1. Dampak terhadap individu 2. Dampak terhadap masyarakat 3. Dampak terhadap organisasi 4. Dampak terhadap sistem sosial	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program bantuan air bersih di Desa Puser memiliki dampak yang minim. Rendahnya dampak ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan, serta kinerja KP-SPAM yang belum optimal, terutama dalam hal perbaikan sarana seperti tower air. Selain itu, dukungan	Perbedaan teori yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi dari William Dunn (2003).

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
			program bantuan air bersih.		yang terbatas dari pemerintah daerah juga menjadi hambatan dalam mengubah perilaku hidup bersih masyarakat setempat.	
5.	Evaluasi Dampak Program Bantuan Bibit Lele dan Hidroponik Oleh Corporate Social Responsibility (CSR) Korindo Group di Kelurahan Pancoran Dedo Kevin Prayoga (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari Program Bantuan Bibit Lele dan Hidroponik yang dijalankan oleh CSR Korindo Group di RW 04, Kelurahan Pancoran. Fokus utama penelitian adalah menilai dampaknya terhadap kondisi	Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi program dari Motz dan Hendrick, yang menitikberatkan pada analisis dampak program tunggal sebelum dan sesudah pelaksanaan (before-after) dengan mempertimbangkan	Program CSR Korindo menunjukkan hasil yang positif namun terbatas. 1. Aspek sosial: Masyarakat RW 04 menunjukkan peningkatan dalam kerja sama dan interaksi sosial.	Perbedaan teori yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi dari William Dunn (2003).

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
		sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat.	dilakukan secara purposive sampling, berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti.	an tiga aspek utama: 1. Sosial 2. Ekonomi 3. Lingkungan	2. Aspek ekonomi: Terdapat kemajuan ekonomi lokal, meskipun dampaknya belum signifikan dalam meningkatkan pendapatan secara menyeluruh. 3. Aspek lingkungan: Lingkungan fisik di wilayah tersebut menjadi lebih asri dan hijau.	

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
6.	<i>Reassessing the Impact of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program: Results of the Third Wave Impact Evaluation</i> A. Orbeta, Kris Ann Melad, Nina Victoria Araos (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali dampak program terhadap hasil di bidang kesehatan dan pendidikan, serta menilai tingkat kesejahteraan rumah tangga dan pengaruhnya terhadap aspek sosial perilaku masyarakat.	Desain diskontinuitas regresi untuk perbandingan dampak. Perawatan dan perbandingan rumah tangga dianalisis dalam bandwidth ambang kemiskinan.	Desain Diskontinuitas Regresi (<i>Regression Discontinuity Design/RDD</i>) adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan dengan membandingkan kelompok yang hampir menerima intervensi (tepat di bawah ambang batas) dan kelompok yang baru saja menerima intervensi (tepat di atas ambang batas).	Hasilnya terdapat dampak positif pada hasil pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, namun, hasil yang tidak konsisten pada nutrisi dan penggunaan perawatan kesehatan ibu.	Perbedaan dari bidang yang ingin dianalisis, dalam penelitian ini berfokus pada bidang sosial, lingkungan, dan ekonomi.

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
7.	<i>The impact evaluation of short repeated programs: The case of parenting skills programs</i> Daniel Del Boca, Chiara Daniela Pronzato, Lucia Schiavon (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari program pelatihan keterampilan mengasuh anak, terutama dalam konteks di mana pengacakan peserta tidak dimungkinkan, namun pelaksanaan program bersifat siklus atau bergelombang. Fokus utama adalah melihat pengaruh program terhadap perilaku dan persepsi orang tua serta dampaknya pada anak.	Metode penelitian kuasi-eksperimental dengan pendekatan <i>pre-post</i> dan <i>cross-sectional</i>, dilengkapi dengan analisis perbedaan karakteristik peserta (untuk mengatasi potensi bias seleksi).	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi dampak program berbasis pendekatan kontrafaktual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program memiliki dampak positif terhadap pentingnya tinggal di lingkungan dengan peluang dan dukungan sosial yang baik, meningkatkan kepercayaan diri orang tua dalam berbagi pengalaman dengan sesama, serta membentuk persepsi positif terhadap penggunaan teknologi seperti tablet dan ponsel dalam pembelajaran	Perbedaan dari bidang yang ingin dianalisis, dalam penelitian ini berfokus pada bidang sosial, lingkungan, dan ekonomi.

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
					dan interaksi anak. Selain itu, ditemukan bahwa keluarga yang mendaftar lebih awal cenderung memiliki karakteristik berbeda, yakni lebih peduli terhadap integrasi sosial, memiliki akses yang lebih besar terhadap kegiatan budaya, dan memanfaatkan waktu bersama anak secara lebih aktif dibandingkan dengan peserta yang mendaftar belakangan.	

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
8.	<i>Health impact evaluation of Aspirational Districts Program in India: Evidence from National Family Health Survey</i> Sandip K. Agarwal, Shubham Mishra (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kausal dari Program Distrik Aspiratif (ADP) di India terhadap indikator kesehatan dan gizi, dengan fokus khusus pada perbandingan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program.	Peneliti menggunakan metode kuantitatif kombinasi Propensity Score Matching (PSM) dan Difference-in-Differences (DID) atau biasa disebut PSM-DID. Data yang digunakan berasal dari dua putaran Survei Kesehatan Keluarga Nasional (NFHS), yaitu putaran ke-4 (2015–16) dan ke-5	Penelitian ini berpijak pada teori evaluasi dampak kausal berbasis kontrafaktual, khususnya dengan menggunakan pendekatan kuasi-eksperimental untuk menilai efek program terhadap perubahan indikator yang ditargetkan. Penggunaan PSM-DID bertujuan untuk memperkirakan dampak program secara lebih akurat dengan membandingkan distrik yang serupa tetapi memiliki status partisipasi	Temuan menunjukkan bahwa ADP tidak memberikan dampak positif yang signifikan secara umum terhadap sebagian besar indikator kesehatan dan gizi. Namun, terdapat penurunan prevalensi balita dengan berat badan kurang sebesar 2–4 poin persentase di distrik sasaran. Di sisi lain, indikasi dampak negatif pada inisiasi menyusui awal	Perbedaan dari bidang yang ingin dianalisis, dalam penelitian ini berfokus pada bidang sosial, lingkungan, dan ekonomi.

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
			(2019–21), yang berperan sebagai data pra dan pasca intervensi.	program yang berbeda.	yang muncul di data NFHS-5 kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, karena hasil ini tidak terlihat dalam data pra-pandemi. Peneliti menyarankan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk menilai keseluruhan indikator agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas ADP.	
9.	<i>Beyond Borders: Evaluating the real</i>	Penelitian ini bertujuan untuk	Pendekatannya bersifat	Penelitian ini secara implisit	Hasil menunjukkan	Perbedaan program yang

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
	<i>impact of an Asia-based short-term study-abroad program for a business capstone unit</i> Subhash Abhayawansa, Jerome Donovan, Viet Le, ryandi Masli, Cheree Topple (2024)	mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa dari program studi di luar negeri jangka pendek, dengan membandingkannya dengan hasil pembelajaran dari program setara yang dilaksanakan di kampus (domestik), khususnya dalam konteks proyek konsultasi industri bisnis.	komparatif dan kuantitatif-deskriptif, karena fokusnya adalah perbandingan hasil yang dilaporkan mahasiswa antara dua model penyampaian program: luar negeri jangka pendek dan program kampus setara.	mengacu pada teori komparatif yaitu dengan membandingkan program serupa dan menganalisis hasil dari kedua program yang dianalisis.	bahwa kedua format program memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa, namun manfaat tambahan yang diperoleh dari program studi luar negeri jangka pendek relatif kecil dibandingkan dengan program kampus. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas unik program luar negeri jangka pendek sebagai metode pembelajaran transformasional	diteliti dan sasarannya.

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
					dan menyoroti perlunya penelitian lanjutan terkait penggunaan dan dampaknya dalam pendidikan tinggi.	
10.	<i>Evaluating the Impact of a Multifaceted Distracted Driving Prevention Program</i> Megan Keiser DNP, RN, CNRN, SCRN, CHSE, ACNS-BC, NP-C, Gergana Damianova Kodjebacheva PhD, Deepika Kandasamy MPH, Flint, MI (2023)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perubahan sikap mahasiswa tingkat sarjana terhadap gangguan saat berkendara setelah berpartisipasi dalam program pencegahan gangguan saat berkendara yang beragam.	Penelitian ini menggunakan desain kuasi-eksperimental , pra-pasca-tes. Partisipan adalah mahasiswa S1 yang berusia 18 tahun atau lebih dan memiliki SIM yang masih berlaku. Kuesioner Penilaian Mengemudi	Teori evaluasi <i>pretest-posttest (before-after evaluation)</i> , khususnya teori evaluasi dampak model <i>one-group pretest-posttest design</i> .	Dari uji sebelum hingga uji setelah, terdapat peningkatan signifikan secara statistik dalam jumlah peserta yang melaporkan bahwa mereka akan memberi tahu teman-teman untuk berhenti mengirim pesan teks dan mengemudi jika	Perbedaan program yang diteliti dan sasarannya.

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
			Sambil Terganggu digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku partisipan.		mereka adalah penumpang, menahan diri untuk tidak mengirim pesan teks saat mengemudi, dan menunggu hingga tiba di rumah sebelum mengambil ponsel mereka dari lantai kendaraan. Peserta merasakan ancaman yang lebih besar dari pengemudi yang berbicara di telepon atau mengirim pesan teks/email dari uji sebelum hingga uji setelah. Selain	

No .	Judul/Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
					itu, sikap terhadap berbicara di perangkat genggam, berbicara di telepon bebas genggam, dan mengirim pesan teks/email menjadi lebih negatif dari uji sebelum hingga uji setelah.	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, dari berbagai sumber (2025)

Penelitian "Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun" (2023) bertujuan menilai efektivitas program Kotaku dalam menangani kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program memberi dampak positif, masih diperlukan evaluasi yang berkelanjutan, terutama dalam hal komunikasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi dalam keberhasilan pelaksanaan program. Perbedaan dengan penelitian ini dengan yang akan diteliti penulis adalah pada penelitian kali ini akan mengulas program penanggulangan permukiman kumuh yang lain yaitu tentang program kampung tematik yang masih jarang diteliti oleh banyak peneliti.

Penelitian Rovi Octavia (2022) menyiarkan dampak Program Kotaku di Kelurahan Duri Barat, Mandau, Bengkalis, dengan fokus pada infrastruktur, kesejahteraan, dan tantangan pelaksanaan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama. Penelitian ini berkontribusi dalam mengidentifikasi aspek-aspek penghambat program. Gap penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait program yang akan dibahas dalam penelitian yaitu tentang keberjalanan program kampung tematik sebagai upaya pengentasan permukiman kumuh dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Penelitian Ria Dwi Anggraini (2019) mengevaluasi dampak Program Kampung Produktif di Dusun Kayu Gadang, Sawahlunto, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan model evaluasi “*after only*”. Hasilnya menunjukkan program belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan warga karena bantuan bersifat sementara. Namun, ada pengaruh pada aspek pendapatan, taraf hidup, dan kepuasan kerja. Penelitian ini berkontribusi untuk variasi model evaluasi yaitu penggunaan model evaluasi “*after only*”. Penelitian penulis memiliki perbedaan dari penelitian ini yaitu penulis akan menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn (2003) dengan 6 kriteria evaluasi.

Penelitian Cyntia Agatha (2023) mengevaluasi dampak program bantuan air bersih di Desa Puser, Serang, menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori evaluasi Samodra Wibawa yang mencakup empat dimensi dampak. Hasilnya menunjukkan dampak program masih minim akibat rendahnya partisipasi masyarakat, kinerja KP-SPAM yang kurang optimal, dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Kontribusi penelitian ini untuk memperluas wawasan terkait teori evaluasi. Jika dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan dampak, maka penelitian penulis akan lebih berfokus pada bagaimana mengukur ketercapaian program menggunakan 6 kriteria evaluasi menurut William Dunn (2003) yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Penelitian Dedo Kevin Prayoga (2021) mengevaluasi dampak Program Bantuan Bibit Lele dan Hidroponik oleh CSR Korindo Group di Kelurahan Pancoran, dengan fokus pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori evaluasi *before-after* dari Motz dan Hendrick, penelitian ini menilai perubahan sebelum dan sesudah program. Kontribusinya terletak pada penggunaan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah *before-after* yang akan digunakan penulis untuk mengetahui dampak dari program kampung tematiknya saja berdasarkan hasil wawancara dan tidak dilakukan penelitian sebelum program dilaksanakan.

Jurnal A. Orbeta dkk. (2023) mengevaluasi dampak Program Pantawid Pamilyang Pilipino terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rumah tangga, dan perilaku sosial. Menggunakan metode *Regression Discontinuity Design* (RDD), studi ini menemukan dampak positif pada pendidikan dan kesehatan anak, namun hasil yang tidak konsisten pada gizi dan layanan kesehatan ibu. Kontribusinya adalah penerapan variasi teori evaluasi untuk memperkaya tinjauan literatur. Gap penelitian yang menjadi kekosongan sehingga dijadikan kebaruan untuk penelitian kali ini adalah terkait aspek yang akan dibahas, yang dimana sebelumnya membahas dari bidang pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan rumah tangga, dan perilaku sosial, sedangkan pada penelitian kali ini akan menyoroti terkait bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penelitian Del Boca dkk. (2024) mengevaluasi dampak program keterampilan mengasuh anak yang dilaksanakan secara bergelombang tanpa pengacakan peserta. Menggunakan metode kuasi-eksperimental *pre-post* dan *cross-sectional* dengan pendekatan kontrafaktual, studi ini menemukan dampak positif pada kepercayaan diri orang tua, persepsi terhadap teknologi, dan pentingnya dukungan sosial. Kontribusinya terletak pada penerapan evaluasi berbasis perbandingan antara kelompok perlakuan dan kontrol. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis akan membahas tentang actor dan pekerjaannya yang dikaitkan dengan peningkatan kondisi ekonomi setelah intervensi program.

Penelitian Agarwal & Mishra (2024) mengevaluasi dampak Program Distrik Aspiratif (ADP) di India terhadap indikator kesehatan dan gizi menggunakan metode PSM-DID dari data NFHS sebelum dan sesudah program. Hasilnya, ADP tidak menunjukkan dampak signifikan secara umum, namun ada penurunan berat badan kurang pada balita sebesar 2–4%. Kontribusinya adalah penerapan evaluasi kausal berbasis kontrafaktual dalam melihat perubahan sebelum dan sesudah program. Banyak program memiliki evaluasi dalam keberjalanannya. Penelitian sebelumnya membahas aspek Kesehatan setelah intervensi program, sedangkan pada penelitian penulis akan membahas dalam aspek ekonomi.

Penelitian Abhayawansa dkk. mengevaluasi pembelajaran mahasiswa dari program studi luar negeri jangka pendek dibandingkan program kampus setara dalam proyek konsultasi bisnis. Dengan

pendekatan komparatif kuantitatif-deskriptif, hasilnya menunjukkan kedua program bermanfaat, namun keunggulan program luar negeri relatif kecil. Kontribusinya adalah model evaluasi baru dengan membandingkan dua program serupa untuk saling mengukur efektivitas. Dalam penelitian penulis, menunjukkan gap penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan program yang diteliti dan sarannya. Penelitian sebelumnya membahas terkait program studi luar negeri dan sasaran programnya adalah mahasiswa, sedangkan pada penelitian penulis akan membahas tentang program kampung tematik dan sarannya adalah pengrajin tahu tempe.

Penelitian *Evaluating the Impact of a Multifaceted Distracted Driving Prevention Program* (2023) mengevaluasi perubahan sikap mahasiswa terhadap gangguan saat berkendara melalui desain *one-group pretest-posttest*. Hasilnya menunjukkan peningkatan sikap positif terhadap keselamatan berkendara setelah program. Kontribusinya adalah menambah wawasan tentang penggunaan model evaluasi pra-pasca dalam perubahan perilaku. Gap penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah terkait program dan sarannya yang dimana pada penelitian ini membahas program pendidikan dengan sarannya adalah mahasiswa, sedangkan pada penelitian penulis akan lebih spesifik membahas terkait program penanggulangan permukiman kumuh dan peningkatan perekonomian yaitu kampung tematik.

1.5.2 Administrasi Publik

Definisi terkait administrasi publik, didasari oleh pengertian dari “administrasi”. Menurut Dunsire (dalam Donovan dan Jackson, 1991) mengartikan administrasi adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok untuk menghasilkan barang dan jasa publik, yang kegiatannya meliputi mengarahkan, mengimplementasikan, menganalisis, merepresentasikan keputusan, dan mempertimbangkan kebijakan. Administrasi merupakan koordinasi dan kerjasama antara sumber daya manusia dengan materi yang ada untuk mencapai tujuan (Trecker dalam Donovan dan Jackson, 1991). Kegiatan dalam administrasi termasuk kegiatan perencanaan, pengprganisasian, dan kepemimpinan. The Publik Administration Dictionary (Chandler dan Plano, 1988) mendefinisikan administrasi sebagai proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan.

Chandler dan Plano (1998) mendefinisikan administrasi publik merupakan adalah tindakan mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya dan personil sektor publik guna merancang, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik. Mereka juga mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah cabang ilmu (kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan) yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan publik sebagai solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu.

Berdasarkan pendapat Mc Curdy (1986)) administrasi publik adalah salah satu cara utama pemerintahan suatu negara. Ini bisa dianggap sebagai sebuah proses politik dan juga sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan berbagai fungsi negara. Dengan demikian, administrasi negara berurusan dengan isu-isu yang tidak hanya terkait dengan aspek administratif negara itu sendiri. Biasanya, istilah "birokrasi" digunakan dalam konteks ini.

Istilah administrasi publik juga sering disebut dengan istilah "birokrasi" karena lebih mudah dipahami oleh orang awam (Ketti, 1993). Istilah *administration of publik* menunjukkan bahwa pemerintah merupakan agen tunggal sebagai regulator dalam mengatur dan mengambil langkah yang menurut mereka penting untuk masyarakat. Dalam artian ini, masyarakat dianggap pasif, tidak berdaya, dan harus tunduk dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian pergeseran istilah menjadi *administration for publik*, menunjukkan sisi yang lebih maju dimana pemerintah berperan sebagai penyedia pelayanan publik (service provider). Dalam hal ini pemerintah lebih responsive dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih memahami cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik. Selanjutnya terdapat istilah tentang *administration by publik*, yang merupakan suatu konsep pemberdayaan masyarakat, yang orientasinya pada kemandirian dan kemampuan masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah pada "empowerment" yang dimana pemerintah memfasilitasi masyarakat agar

mampu mengatur hidupnya sendiri tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah (dalam Keban, 2014).

Berdasarkan tinjauan dari beberapa literatur, belum ada kata seakurat terkait definisi administrasi publik karena administrasi publik merupakan konsep yang luas (Lemay, 2002). Menurut Fesler (1980), administrasi publik merupakan *administration of governmental affairs*, yang menunjukkan bahwa administrasi publik sebagai penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan dalam suatu birokrasi yang bertujuan untuk membantu kepentingan publik. Stillman II (1991) berpendapat bahwa istilah administrasi publik sangat bervariasi sehingga sulit untuk disepakati, yang kemudian dirangkum dalam beberapa variasi pendapat, sebagai berikut:

1. Menurut Dimock, Dimock, & Fox, administrasi publik merupakan proses perencanaan barang dan jasa yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut mengarah bahwa administrasi publik sebagai suatu kegiatan ekonomi.
2. Barton & Chappel mendefinisikan administrasi publik sebagai *the work of government* atau segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan pada aspek keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan publik.
3. Starling mengartikan administrasi publik sebagai suatu pencapaian pemerintah atau janji pemerintah saat kampanye pemilihan.

Batasan tersebut menekankan the accomplishing side of government dan seleksi kebijakan publik.

4. Nigro & Nigro menyebutkan bahwa administrasi publik adalah Kerjasama kelompok di lingkungan publik yang meliputi lembaga legislative, yudikatif, dan eksekutif, yang dimana setiap lembaga memiliki peranannya masing-masing dalam menyusun suatu kebijakan publik, yang menunjukkan perbedaan dengan administrasi swasta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian ini menekankan bahwa proses institusional sebagai kegiatan publik yang berbeda dengan kegiatan swasta.
5. Rosenbloom menyebutkan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi mandat pemerintah di bidang legislative, yudikatif, dan eksekutif, administrasi publik memanfaatkan teori-teori manajemen, politik, dan hukum. Dalam kata lain bahwa proses institusional merupakan kombinasi ketiga jenis kegiatan pemerintah yaitu legislative, yudikatif, dan eksekutif.
6. Nicholas Henry memberikan Batasan administrasi publik merupakan suatu kombinasi antara praktek dan teori dengan tujuan memberikan pemahaman tentang peranan pemerintah yang memprovider pelayanan dengan masyarakat yang menerima layanan. Dalam prakteknya, administrasi publik mengimplementasikan konsep manajemen agar sesuai dengan

efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan sosial dengan lebih baik. pada hakekatnya, administrasi publik diartikan sebagai kombinasi antara teori dan praktek dengan mencampuri praktek manajemen dengan titik pencapaian nilai-nilai normative dalam masyarakat.

Kompleksitas unsur dalam administrasi publik, memaknai sudut pandang administrasi publik dalam enam dimensi strategis, sebagai berikut:

1. Dimensi Kebijakan, yaitu proses pembuatan keputusan atau penentuan alternative terbaik untuk mencapai tujuan.
2. Dimensi Struktur Organisasi, yaitu pengaturan stuktur kelembagaan yang meliputi pembentukan unit dan pembagian tugas untuk mencapai tujuan, sebagai bentuk wewenang dan tanggung jawab.
3. Dimensi Manajemen, yaitu implemnetasi kegiatan yang telah direncanakan dengan prinsip-prinsip manajemen.
4. Dimensi Etika, yaitu moralitas administrator dalam memberikan pelayanan publik.
5. Dimensi Lingkungan, yaitu suasana atau kondisi sekitar yang dapat mempengaruhi dimensi lainnya.
6. Dimensi Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan fungsi-fuungsi administrasi publik.

Paradigma didefinisikan sebagai suatu sudut pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu permasalahan yang dianut oleh masyarakat dalam masa tertentu. Dalam perkembangannya, administrasi publik mengalami beberapa kali perubahan paradigma, yaitu sebagai berikut:

1. Paradigma I Administrasi Publik

Dalam Paradigma I, yang dikenal sebagai Dikotomi Administrasi Politik (1900-1926), ide utamanya adalah pemisahan fungsi politik dan fungsi administrasi pemerintahan sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pada paradigma ini, diadvokasi bahwa administrasi atau manajemen harus mengikuti prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterapkan baik di lingkungan publik maupun swasta.

2. Paradigma II Administrasi Publik

Paradigma II ini menekankan pada gagasan bahwa ada prinsip-prinsip administrasi universal yang dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen di berbagai konteks administratif, tanpa memandang perbedaan sektor atau aspek budaya. Prinsip-prinsip ini, yang ditemukan dalam akronim POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) menjadi poin pusat dalam tahap ini dan bertujuan untuk menciptakan dasar administratif yang lebih ilmiah dan efisien.

3. Paradigma III Administrasi Publik

Dalam Paradigma III, yang disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970), terjadi pergeseran penting dalam pemahaman administrasi publik. Pada paradigma ini, administrasi publik dipandang sebagai bagian dari ilmu politik, dan terjadi upaya dari para ilmuwan politik untuk mengambil kembali kendali atas bidang administrasi publik. Periode ini juga dikenal sebagai era berkurangnya pemisahan dan penekanan pada prinsip-prinsip.

4. Paradigma IV Administrasi Publik

Menurut Henry (1975), Paradigma IV dalam perkembangan ilmu administrasi publik merujuk pada konsep administrasi publik sebagai manajemen, periode ini berlangsung dari tahun 1956 hingga 1970. Hal ini sebagian besar bersamaan dengan Paradigma III, yang menunjukkan bahwa perkembangan ini tidak selalu menguntungkan ilmu politik, karena beberapa sarjana lebih berfokus pada gagasan manajemen dalam administrasi publik.

5. Paradigma V Administrasi Publik

Saat ini, ada upaya untuk mengembangkan kembali ilmu administrasi publik sebagai sebuah disiplin mandiri. Namun, dalam proses ini, perhatian yang sebelumnya difokuskan pada hierarki birokrasi telah bergeser ke pasar dan organisasi sektor swasta. Dengan kata lain, terjadi peralihan dari model administrasi

publik yang konvensional dan tradisional ke model New Public Management (NPM). Meskipun ini berlawanan dengan paradigma atau tahapan perkembangan administrasi publik yang diakui oleh Henry (1975), ini adalah perubahan paradigma yang signifikan menurut pandangan Peters (2003).

6. Paradigma VI Administrasi Publik

Paradigma VI, yaitu Tata Kelola (sejak tahun 1990 hingga sekarang), adalah implementasi kekuasaan oleh pemimpin politik untuk kepentingan kesejahteraan warga negara. Ini adalah proses kompleks di mana berbagai sektor masyarakat memiliki pengaruh dan berperan dalam penetapan dan pengumuman kebijakan publik yang berdampak langsung pada aspek kemanusiaan, interaksi sosial, dan perkembangan ekonomi dan sosial.

1.5.3 Kebijakan Publik

Istilah “kebijakan” berbeda dengan “kebijaksanaan”. Istilah kebijakan didefinisikan sebagai suatu alternative yang sudah siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan istilah “kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu keputusan yang memungkinkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, maupun sebaliknya, berdasarkan alasan tertentu seperti pertimbangan atas kemanusiaan, keadaan darurat, dsb. Graycar (dalam Donovan dan Jackson, 1991) menyebutkan bahwa kebijakan merupakan suatu perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Kebijakan diartikan sebagai suatu ide yang disajikan secara tertulis yang

dirumuskan oleh otoritas formal, sebagai tuntutan atau pegangan kegiatan, dan sebagai hasil dari suatu proses pengelolaan kebijakan.

Hogwood dan Gunn (dalam Turner & Hulme, 1997) menjelaskan bahwa kebijakan (*policy*) sebagai *labelling* bagi suatu bidang kegiatan atau dapat juga didefinisikan sebagai tujuan umum atau kondisi yang diinginkan. Kebijakan dapat dilihat sebagai keputusan pemerintah atau suatu program atau sebagai suatu “proses” seperti penetapan tujuan, pembuatan keputusan untuk implementasi. Menurut Turne dan Hulme (1996) merumuskan *policy* sebagai suatu proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan. Dalam pengertian lain, kebijakan dijadikan sebagai suatu keputusan yang bersifat hierarkis (Shafritz dan Russel, 1997). Biasanya kebijakan dikaitkan dengan suatu pemecahan masalah atau sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah yang muncul (Michael C. Lemay, 2002).

Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan pemerintah dalam menangani publik problems (Lemay, 2002) Kebijakan ini melibatkan proses yang kompleks, mulai dari identifikasi masalah, perumusan solusi, hingga implementasi dan evaluasi. Kebijakan publik dibuat dengan tujuan untuk menciptakan perubahan yang positif dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, dan ekonomi. Menurut Buku Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1988) publik policy merupakan suatu pemanfaatan sumber daya yang ada guna menyelesaikan permasalahan publik atau pemerintah. Mereka juga menganggap bahwa

kebijakan publik sebagai suatu bentuk intervensi pemerintah kepada orang-orang yang kurang berdaya agar mereka dapat terus berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan kata lain, kebijakan publik tidak hanya berbicara terkait pemanfaatan sumber daya, tetapi juga tentang dimensi moral yang mendalam.

Pendapat lain menurut Shafritz dan Russel (1997) mendefinisikan kebijakan publik dalam istilah *a government decides to do or not to do*. Selanjutnya, Peterson (2003) berpendapat bahwa kebijakan publik sebagai aksi pemerintah dalam menyelesaikan masalah, dengan memfokuskan terhadap “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”. Definisi lain mengutip pendapat lain dari James Anderson yang menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau hal yang menjadi perhatian. Kebijakan publik adalah jumlah kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui agen, yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan warga negara (B.G. Peters, hal 1030).

Pada hakekatnya, kebijakan dibedakan menjadi beberapa bentuk, yang diwujudkan dalam satu proyek atau program. Berikut beberapa bentuk kebijakan, diantaranya:

1. *Regulatory*, untuk mengatur perilaku seseorang,
2. *Redistributive*, mendistribusikan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin.

3. *Distributive*, memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu,
4. *Constituent*, sebagai alat pelindung negara.

Selain bentuk, kebijakan juga terbagi menjadi beberapa tipe. Menurut J.Q Wilson (dikutip dari Peterson, 2003) menyebutkan ada beberapa tipe kebijakan, yaitu:

1. *Majoritarian*, yaitu tipe yang cenderung mendistribusikan biaya sekaligus mendistribusikan manfaat.
2. *Enterpreneurial*, yaitu tipe yang membebankan biaya kepada sebagian orang, tetapi benefitnya dapat dinikmati secara luas.
3. *Client*, yaitu tipe yang membebani biaya kepada masyarakat melalui subsidi, tetapi benefitnya hanya dirasakan oleh beberapa orang saja.
4. *Interest group*, yaitu tipe yang membebankan biaya kepada kelompok tertentu, yang hasilnya ada yang untung dan ada yang kurang beruntung.

Berbicara tentang kebijakan publik, maka akan berkaitan dengan prosesnya. Proses kebijakan publik diartikan sebagai suatu proses menentukan pilihan kebijakan dengan tahapan-tahapannya, yang dilakukan secara teoritis dan didasarkan pada berbagai faktor yang terwujud dalam model-model kebijakan publik (Hill, 2005). Dalam proses kebijakan publik akan sangat *familiar* dengan teori terkait siapa atau pihak

mana yang berpengaruh. Berikut beberapa poin terkait proses kebijakan publik:

1. Tahap-tahap Kebijakan

Tahap-tahap kebijakan publik adalah rangkaian proses yang dilalui dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan. Dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan, maka dirumuskan beberapa tahapan penting (Dunn, 2004), yaitu: perumusan masalah, *agenda setting*, *policy formulation*, *policy adoption*, *policy implementation*, dan *policy assessment*.

2. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi, membandingkan, dan merekomendasikan pilihan-pilihan kebijakan yang bertujuan menyelesaikan masalah publik. Dalam analisis kebijakan, dibagi menjadi identifikasi masalah, identifikasi alternative, seleksi alternative, dan pengusulan alternative.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi diartikan sebagai suatu realisasi dari program yang sudah dirancang atau direncanakan (Gordon, 1986). Dalam hal ini, administrator berperan untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan terpilih.

4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Tahap monitoring ini merupakan tahapan penting untuk mengawasi proses implementasi. Monitoring dilakukan pengamatan langsung dilapangan yang hasilnya untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi. Tahapan evaluasi digunakan untuk mempelajari hasil dari program yang telah diimplementasikan dan mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, penulis akan memperdalam pembahasan terkait evaluasi. Evaluasi yang akan dibahas yaitu tentang evaluasi dampak program atau kebijakan yang menekankan tentang efek yang dihasilkan setelah implementasi program.

1.5.4 Evaluasi Kebijakan

Definisi evaluasi kebijakan menurut Samudra, dkk (1994) menyebutkan bahwa adanya evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektifitas dampak dari suatu kebijakan. Winarno (2012) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai suatu bentuk upaya untuk mengetahui dampak suatu kebijakan dalam kehidupan nyata. Secara manajerial, evaluasi kebijakan merupakan proses menilai atau membandingkan pencapaian suatu program secara objektif berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Abdullah dan Yudi Rusfianan, 2016).

Evaluasi kebijakan ditunjukkan untuk menilai sebab-sebab kegagalan dari implementasi kebijakan atau guna mengetahui sejauh mana dampak dari suatu kebijakan.. Menurut Lesler dan Stewart (dalam Winarno, 2012) menyebutkan ada 2 tugas dalam evaluasi, yaitu:

1. Menentukan kemungkinan konsekuensi dari suatu kebijakan yang akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi dampaknya.
2. Menentukan keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan memiliki tujuan penting dalam merumuskan suatu kebijakan karena dampaknya yang besar untuk masyarakat (Hartuti Purnaweni, 2019). Berikut tujuan dari evaluasi adalah:

1. Menilai efektifitas kebijakan,
2. Mengukur efisiensi pelaksanaan,
3. Memberikan dasar untuk pengambilan keputusan,
4. Mengetahui dampak kebijakan terhadap masyarakat,
5. Menyediakan umpan balik untuk perbaikan kebijakan.

Evaluasi kebijakan memberikan informasi terkait kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh keterbutuhan dan nilai atau kesempatan yang dapat dicapai melalui tindakan public (Dunn, 2003). Konsep evaluasi kebijakan menjurus terkait pengukuran nilai dan manfaat dari suatu kebijakan. Evaluasi membantu memberikan kritik terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar penentuan tujuan dan target (Dunn, 2003). Dapat

disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan memastikan bahwa implementasi program berjalan dengan baik dan sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dapat menjelaskan bagaimana suatu program dinyatakan berhasil disuatu tempat namun gagal ditempat yang lain, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki program tersebut (Hartuti Purnaweni, 2019).

Dalam evaluasi kebijakan, terdapat beberapa model yang dikembangkan. William N Dunn (2003) menyebutkan ada 6 kriteria yang menjadi tolak ukur dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas, untuk mengetahui ketercapaian hasil dari program yang telah diimplementasikan.
2. Efisiensi, untuk mengukur usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
3. Kecukupan, untuk menganalisis seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah.
4. Perataan, untuk memastikan pemerataan distribusi biaya dan manfaat bagi semua kelompok.
5. Responsivitas, untuk mengidentifikasi kepuasan kebutuhan dari kebijakan yang dihasilkan.
6. Ketepatan, untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai memiliki nilai yang berguna.

Bridgman dan Davis (2001), menyebutkan 4 indikator yang terkait evaluasi kebijakan, antara lain:

1. *Input* adalah sumber daya pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
2. *Process* adalah bagaimana suatu kebijakan ditransformasikan atau diimplementasikan kepada masyarakat.
3. *Outputs* adalah hasil atau produk dari sebuah kebijakan public.
4. *Outcomes* adalah dampak yang diterima masyarakat dari implementasi kebijakan yang dilakukan.

Evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick atau dikenal dengan istilah *Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model*, dengan 4 level evaluasi, yaitu:

1. *Reaction*, yaitu sejauh mana sasaran merasa puas dan merespons positif terhadap pelatihan atau program.
2. *Learning*, yaitu seberapa besar pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru yang diperoleh sasaran setelah mengikuti program.
3. *Behavior*, yaitu sejauh mana peserta menerapkan hasil pembelajaran dalam situasi nyata atau lingkungan kerja.
4. *Result*, yaitu dampak akhir dari program terhadap organisasi atau masyarakat, seperti peningkatan kinerja, efisiensi, atau perubahan sosial.

Evaluasi model Logic yang dirumuskan oleh Frechtling (2007) menyebutkan ada 4 komponen utama dalam evaluasi, diantaranya:

1. *Input* adalah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program (misalnya dana, tenaga, fasilitas).

2. *Activities* adalah kegiatan atau proses yang dilakukan dalam program (misalnya pelatihan, sosialisasi, layanan).
3. *Ouputs* adalah hasil langsung dari kegiatan program (misalnya jumlah sasaran, modul yang dibagikan).
4. *Outcome* adalah perubahan atau manfaat jangka pendek hingga menengah yang dirasakan oleh penerima program (misalnya peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku).

Menurut Rossi *et.al* (2004) menyebutkan ada 5 tipe evaluasi kebijakan, antara lain:

1. *Assessing the Need for a Program*

Evaluasi kebutuhan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kebutuhan akan suatu program yang akan dijalankan. Dengan evaluasi kebutuhan, akan membantu untuk menentukan prioritas kebutuhan mengenai suatu program. Rossi *et.al* (2004) mendeskripsikan langkah-langkah dalam menentukan analisis kebutuhan, yaitu:

- a. Identifikasi pengguna dan kegunaan,
- b. Mendeskripsikan target dan lingkungan pelaksanaan,
- c. Identifikasi kebutuhan,
- d. Mengukur kebutuhan,
- e. Mengomunikasikan dengan pemangku kepentingan.

2. *Assesment of Program Theory*

Teori dalam suatu program merupakan salah satu hal yang dapat dievaluasi, pasalnya kelemahan teori yang mendasari keberjalanan suatu program akan memperkecil kemungkinan ketercapaian hasil yang diharapkan sebelumnya (Rossi *et.al*, 2004).

3. *Assesment of Program Process*

Menurut Rossi *et.al* (2004) evaluasi proses program berfokus pada program yang dijalankan itu sendiri – mencakup operasional, aktivitas, fungsi, kinerja, bagian-bagian komponennya, sumber daya, dan sebagainya. Evaluasi proses program terdiri dari beberapa bentuk yang meliputi evaluasi proses atau implementasi dan pemantauan proses program.

4. *Impact Assessment*

Impact Assessment atau disebut juga *impact evaluation or outcome evaluation* berrujuan untuk mengetahui perubahan dari hasil intervensi suatu program.

5. *Efficiency Assesment*

Penilaian efisiensi – analisis biaya-manfaat dan analisis efektivitas biaya – memberikan kerangka acuan untuk mengaitkan biaya dengan hasil program (Rossi *et.al*, 2004). *Efficiency Assessment* bertujuan untuk mengetahui hubungan antara biayan yang dikeluarkan dengan manfaat yang dihasilkan.

Model evaluasi lain, dikemukakan oleh Stake (Mardinah & Syarifudin, 2019), yaitu *Countenance Evaluation Model*, yang menekankan 2 aspek dalam evaluasi, yakni deskripsi dan pertimbangan. Deskripsi mencakup tujuan yang direncanakan dan hasil yang terjadi, sedangkan pertimbangan mencakup standar dan penilaian yang didasarkan perbandingan dengan program lain. Model ini bertujuan untuk menilai efektifitas suatu program yang dijalankan dengan cara meng-*compare* dengan standar yang telah ditentukan. Stake menyebutkan ada 3 tahapan dalam evaluasi, yaitu:

1. Antecedent (kondisi awal), artinya kondisi awal atau faktor yang ada sebelum program dimulai, seperti kebutuhan, tujuan, sumber daya, dan konteks kebijakan.
2. Transaksi (proses pelaksanaan), artinya proses pelaksanaan program, termasuk aktivitas, interaksi, dan metode yang digunakan selama program berlangsung.
3. Keluaran (hasil program), hasil atau dampak langsung dari program yang terlihat setelah kegiatan selesai, seperti perubahan pengetahuan, sikap, atau keterampilan peserta.

Menurut Sugiyono (2013), berdasarkan waktu pelaksanaannya, evaluasi terbagi menjadi 2, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Berikut penjelasannya:

1. Evaluasi formatif merupakan jenis evaluasi yang dilakukan saat program masih berjalan. Tujuannya untuk menilai kualitas

pelaksanaan program serta konteks organisasi, termasuk aspek-aspek seperti personil, prosedur kerja, dan sumber daya yang digunakan.

2. Evaluasi sumatif merupakan bentuk evaluasi untuk melihat hasil dari program yang dilaksanakan dan dilakukan setelah program selesai. Tujuannya adalah menilai efektifitas dari pencapaian program, terutama dalam menghasilkan suatu produk atau keluaran tertentu.

Model lain dari evaluasi adalah evaluasi CIPP menurut Stufflebeam. Berdasarkan pendapat dari Madaus, Scriven, Stufflebeam (1993), menyebutkan bahwa evaluasi bertujuan untuk memperbaiki suatu program. Evaluasi CIPP tidak hanya mengevaluasi terkait pelaksanaan program tetapi juga terkait hasil-hasil yang didapatkan dari pelaksanaan program tersebut. Stufflebeam mengemukakan 4 dimensi dalam evaluasi, yaitu:

1. *Context* yaitu kondisi dan kebutuhan yang melatarbelakangi program; digunakan untuk menetapkan tujuan dan arah program.
2. *Input* yaitu sumber daya, strategi, dan rencana yang disiapkan untuk mencapai tujuan program.
3. *Process* yaitu pelaksanaan kegiatan program, termasuk cara, prosedur, dan interaksi yang terjadi selama program berlangsung.
4. *Output* yaitu hasil akhir dari program, baik yang diharapkan (tujuan tercapai) maupun tidak diharapkan (efek samping).

Konsep evaluasi menurut Finstterbusch dan Motz (1994) menyebutkan ada 4 jenis evaluasi, yaitu:

1. *Single Programe After Only*, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah program selesai, tanpa informasi sebelum pelaksanaan.
2. *Single Programme Before After*, yaitu evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah program pada kelompok yang sama, untuk melihat perubahan.
3. *Comparative After Only*, yaitu evaluasi dengan membandingkan dua kelompok berbeda dan dilakukan setelah program selesai.
4. *Comparative Before After*, yaitu evaluasi untuk mengukur perubahan sebelum dan sesudah pada dua kelompok (intervensi dan kontrol), untuk melihat dampak program secara lebih akurat.

Tabel 1. 3 Metode Evaluasi

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi yang diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
<i>Single program after only</i>	-	☑	-	Keadaan kelompok sasaran
<i>Single program before-after</i>	☑	☑	-	Perubahan sebelum dan sesudah pada kelompok sasaran
<i>Comparetive after only</i>	-	☑	☑	Keadaan kelompok sasaran dan kelompok control
<i>Comparative before-after</i>	☑	☑	☑	Efek program terhadap kelompok

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi yang diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
				sasaran dan kelompok kontrol

Sumber: Finterbusch dan Motz dalam Wibawa (1994)

Dalam penelitian ini model evaluasi kebijakan yang paling relevan untuk membahas latar belakang peningkatan perekonomian adalah model evaluasi teori dari William Dunn (2003) dengan 6 fenomena, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi akan mencakup aspek efektivitas program dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi, efisiensi penggunaan sumber daya, kecukupan intervensi terhadap kebutuhan masyarakat, pemerataan manfaat di seluruh kelompok masyarakat, responsivitas program terhadap kebutuhan lokal, serta ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dipandang tepat untuk digunakan karena mampu memberikan kerangka analisis yang sistematis dan komprehensif dalam mengevaluasi pelaksanaan program kampung tematik, sekaligus mengungkap kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan pada Kampung Tematik Tahu Tempe.

1.5.5 Kampung Tematik

Kampung Tematik merupakan sebuah kawasan di bawah kelurahan yang mencerminkan identitas, karakter, serta nilai-nilai masyarakatnya

melalui pengembangan potensi lokal yang dipilih dan disepakati bersama oleh warga. Tujuan utama dari program Kampung Tematik antara lain:

1. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal;
2. Mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih layak dan berkualitas;
3. Menggali serta menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan potensi dan penyelesaian persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain tujuan, kampung tematik juga memiliki sasaran dalam pelaksanaannya yaitu mencakup:

1. Menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran;
2. Mengubah kawasan kumuh menjadi lingkungan yang lebih tertata dan layak huni;
3. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat serta lingkungan sekitarnya;
5. Menumbuhkan rasa kepedulian dan memperkuat identitas kampung sebagai landasan pembangunan wilayah, sekaligus memberdayakan masyarakat;
6. Menjadi contoh inspiratif bagi kampung lain untuk mengembangkan konsep serupa;

7. Menarik keterlibatan pelaku usaha dalam memberikan kontribusi sosial bagi keberhasilan program ini di Kota Semarang;
8. Meningkatkan dinamika dan pertumbuhan ekonomi lokal; serta
9. Menambah pilihan destinasi wisata baru yang menarik.

Tabel 1. 4 Jumlah Kampung Tematik di Kota Semarang

No.	Tahun	Jumlah Kampung Tematik
1.	2016	32 kampung
2.	2017	80 kampung
3.	2018	65 kampung
4.	2019	32 kampung
5.	2020	26 kampung
6.	2021	15 kampung
7.	2022	10 kampung
8.	2023	9 kampung

Sumber: Website Jendela Inovasi Kota, n.d.

Perkembangan kampung tematik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2023, jumlah kampung tematik di Kota Semarang yaitu sebanyak 269 kampung tematik yang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan.

Dalam penyelenggaraan program Kampung Tematik, sejumlah regulasi dan landasan hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 berkaitan dengan Penanganan Fakir Miskin;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah Kota Semarang;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 mengenai Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang untuk periode 2021–2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016–2021; dan
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan program Kampung Tematik. Pelaksanaan Kampung Tematik mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pembangunan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya adalah Pemerintah Kota Semarang (meliputi Kelurahan, Kecamatan, hingga perangkat daerah terkait), tokoh

masyarakat, pelaku tematik, lembaga kemasyarakatan, sektor swasta melalui program CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta peran akademisi melalui implementasi Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Seluruh kolaborasi ini mencerminkan semangat “Bergerak Bersama” dalam pembangunan Kota Semarang. Dalam praktiknya, Kampung Tematik juga dapat diibaratkan sebagai sebuah “laboratorium sosial” tempat berbagai pihak bekerja bersama untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.

Terkait pembiayaan, dana pembangunan Kampung Tematik dapat berasal dari berbagai sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, kontribusi CSR atau PKBL, maupun dari partisipasi swadaya masyarakat. Khusus untuk pendanaan yang berasal dari APBD Kota Semarang, sejak tahun 2016 hingga sekarang, setiap kampung tematik yang telah ditetapkan memperoleh alokasi dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dana ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan rencana aksi yang bertujuan mengembangkan potensi lokal dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kecamatan tempat kampung tematik berada.

Selain sebagai dana stimulan, anggaran tersebut juga dapat diintegrasikan dengan berbagai sumber pendanaan dari perangkat daerah lainnya, seperti program pemberdayaan perempuan, forum kesehatan

kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat, pembinaan kesejahteraan keluarga, forum musrenbang, program penanggulangan kemiskinan, serta kegiatan perangkat daerah lainnya yang memiliki tugas dan fungsi sejalan dengan tema yang diusung kampung tematik.

Salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan Kampung Tematik adalah penetapan tema, yang perlu mempertimbangkan kelayakan dan indikator tertentu, mencakup aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur.

1. Kriteria tema dalam aspek sosial antara lain:

- a. Diutamakan untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi;
- b. Memiliki potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut;
- c. Adanya semangat dari warga untuk memajukan lingkungan tempat tinggal serta kesediaan mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan;
- d. Terdapat persoalan sosial yang mendesak untuk segera diselesaikan.

2. Kelayakan tema dari sisi ekonomi mencakup:

- a. Tersedianya potensi sumber daya alam atau lingkungan yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, seperti tata ruang wilayah yang memungkinkan pengembangan, dan/atau potensi pengelolaan sampah secara produktif;

- b. Adanya potensi dari sumber daya manusia setempat, misalnya dalam bidang seni dan budaya, keterampilan yang dimiliki warga, kebiasaan atau perilaku sosial yang mendukung pengembangan ekonomi;
 - c. Keberadaan kelompok masyarakat yang aktif secara produktif yang direalisasikan dengan tersedianya produk hasil karya warga setempat.
3. Indikator tema dari sisi infrastruktur meliputi:
- a. Lingkungan pemukiman yang tergolong kumuh;
 - b. Kawasan yang tandus atau minim ruang hijau;
 - c. Lingkungan dengan tata letak hunian yang tidak teratur; dan
 - d. Wilayah yang mengalami penurunan kualitas daya dukung lingkungan.

Dalam implementasi Kampung Tematik, prosesnya terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi: identifikasi potensi dan masalah, penetapan tema, penyusunan proposal, verifikasi, pendampingan, pelaksanaan kegiatan, hingga tahap pemantauan dan evaluasi.

1. Pemetaan potensi dan permasalahan yang difasilitasi oleh pihak Kelurahan, dengan mempertimbangkan indikator pada aspek sosial, ekonomi, dan/atau infrastruktur. Setelah itu dilakukan penentuan tema yang akan diajukan sebagai identitas kampung tematik. Penekanan utama dalam penentuan tema ini adalah pada

potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan. Dalam proses pemetaan dan penentuan tema tersebut, Kelurahan bekerja bersama dengan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), RW, RT, PKK, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku seni dan budaya, Badan Keswadayaan Masyarakat, maupun Karang Taruna.

2. Penyusunan proposal perencanaan Kampung Tematik berdasarkan tema yang telah disepakati. Proposal tersebut ditujukan kepada Wali Kota Semarang melalui Bappeda Kota Semarang. Isi dari proposal ini setidaknya mencakup:

- a. latar belakang program,
- b. hasil identifikasi potensi dan permasalahan,
- c. rencana tindak lanjut,
- d. tujuan yang ingin dicapai,
- e. dokumentasi kondisi eksisting,
- f. visualisasi rencana pengembangan,
- g. rincian anggaran dan pembiayaan, serta
- h. berita acara hasil musyawarah warga.

3. Proposal Kampung Tematik yang telah disusun oleh Kelurahan bersama Kecamatan selanjutnya dikirimkan ke Bappeda Kota Semarang untuk dilakukan verifikasi. Dalam proses verifikasi ini, Lurah dari wilayah yang mengusulkan Kampung Tematik mempresentasikan isi proposal dengan didampingi pihak

Kecamatan, serta dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat atau pelaku tematik dari wilayah tersebut.

4. Proses verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari Bappeda Kota Semarang dan Perangkat Daerah yang relevan dengan tema yang diusulkan. Tim ini juga dapat melibatkan tenaga ahli, unsur profesional, akademisi, atau perwakilan masyarakat. Tim akan mengevaluasi isi proposal, termasuk potensi dan permasalahan yang diangkat, rencana tindak lanjut, kebutuhan anggaran, serta kesesuaian antara tema dan isi proposal.
5. Selanjutnya adalah kunjungan lapangan oleh supervise ke lokasi usulan kampung tematik. Tim verifikasi akan meninjau langsung untuk memastikan kesesuaian antara proposal dan kondisi riil di lapangan, mengumpulkan data tambahan, serta berdiskusi dengan masyarakat setempat untuk menyempurnakan perencanaan.
6. Kemudian diadakan rapat pleno yang digelar tim verifikasi untuk menyimpulkan hasil dari proses peninjauan dan verifikasi. Dalam forum ini akan diputuskan kampung mana yang layak direkomendasikan dan mana yang tidak. Kampung yang direkomendasikan akan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Wali Kota Semarang mengenai penetapan lokasi dan tema Kampung Tematik pada tahun berjalan.
7. Setiap kampung tematik yang telah ditetapkan secara resmi akan menerima dana stimulan sebesar Rp 200.000.000,- dari APBD

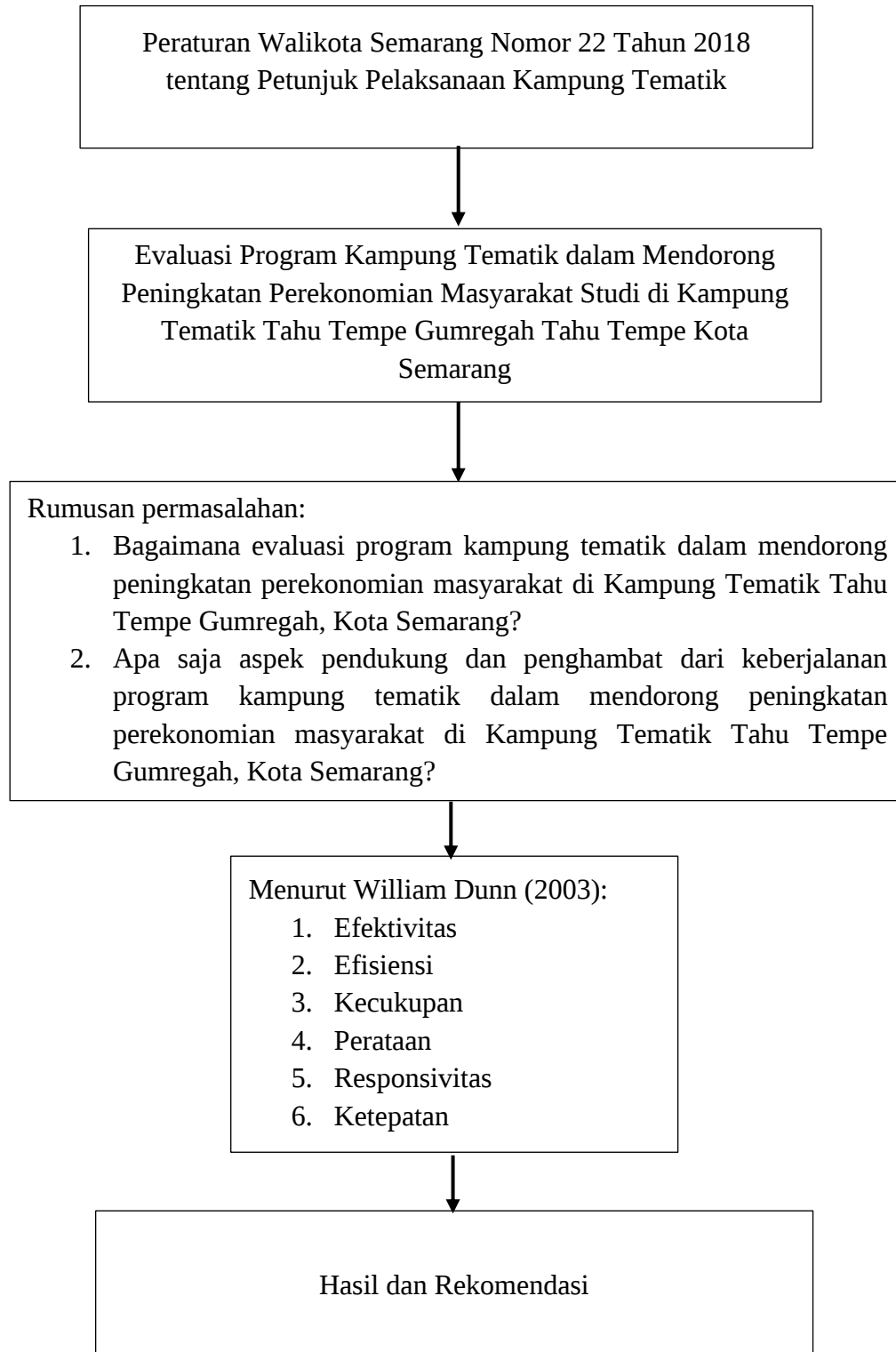
Kota Semarang, dialokasikan melalui perangkat daerah kecamatan. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Untuk mendukung efektivitas program, dana stimulan ini dapat dikombinasikan dengan sumber pendanaan lain seperti hasil Musrenbang, dana pemberdayaan masyarakat, dana CSR dari pihak swasta, pengabdian dari perguruan tinggi, maupun gotong royong warga.

8. Terakhir, dilakukan monitoring oleh perangkat daerah pelaksana (Kecamatan) selama proses pembangunan berlangsung. Sementara itu, evaluasi keseluruhan dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang setelah kegiatan pembangunan selesai.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Kampung Tematik antara lain:

1. Terbentuknya karakter dan sikap masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya;
2. Tercapainya peningkatan kesejahteraan warga melalui aktivitas ekonomi yang berkembang berdasarkan potensi lokal yang diangkat;
3. Terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih tertata dan berkualitas, ditandai dengan kondisi jalan yang layak, sistem drainase yang baik, serta fasilitas sanitasi dan penghijauan yang memadai.

1.5.6 Kerangka Teori



1.6 Operasionalisasi Konsep

Program Kampung Tematik yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal, kemudian mengintegrasikannya ke dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan diukur melalui dampak nyata pada kesejahteraan ekonomi warga dan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Efektivitas guna menilai sejauh mana tujuan peningkatan ekonomi tercapai. Ini terlihat dari peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga di kampung tersebut, terutama dari sektor-sektor yang terkait dengan tema. Indikator lain adalah peningkatan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di kampung tematik.
2. Efisiensi fokusnya adalah bagaimana sumber daya dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Efisiensi juga tercermin dari pengelolaan sumber daya yang baik hingga terjadi peningkatan penjualan yang lebih baik.
3. Kecukupan menilai apakah sumber daya yang dialokasikan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk ketersediaan modal usaha yang cukup untuk UMKM, baik dari pemerintah, perbankan, atau swadaya. Ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai, seperti fasilitas produksi, pusat distribusi, atau kios penjualan, juga menjadi penting. Selain itu, jumlah dan kualitas pelatihan keterampilan ekonomi yang diberikan

harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan tema kampung, memastikan masyarakat memiliki keahlian yang relevan.

4. Perataan artinya program harus memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebar secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti tidak hanya segelintir pelaku usaha besar yang diuntungkan, melainkan juga UMKM dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok rentan, memiliki akses yang sama terhadap permodalan, pelatihan, dan pasar. Perataan dapat berupa penurunan tingkat kesenjangan pendapatan antar kelompok di kampung tersebut dan distribusi keuntungan yang lebih merata di antara para pelaku usaha.
5. Responsivitas artinya kemampuan program untuk cepat menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Program harus tanggap terhadap perubahan permintaan konsumen atau *trend* ekonomi, misalnya dengan mengubah jenis produk atau strategi pemasaran. Adanya mekanisme umpan balik dari pelaku usaha terkait tantangan pasar atau kebutuhan dukungan, serta fasilitator dalam menanggapi masalah ekonomi, misalnya, kendala perizinan atau pemasaran.
6. Ketepatan mengacu pada relevansi strategi program dengan tujuan peningkatan ekonomi. Ini berarti pemilihan tema kampung harus benar-benar didasarkan pada potensi ekonomi lokal yang kuat dan memiliki daya saing. Intervensi program (misalnya, pelatihan produksi, pengembangan pasar, atau bantuan modal) harus tepat sasaran dan dirancang untuk mengatasi hambatan ekonomi yang spesifik. Selain itu, data awal mengenai

kondisi perekonomian masyarakat sebelum program harus akurat sebagai dasar perencanaan dan tolok ukur keberhasilan.

Tabel 1. 5 Tabel Fenomena

Fenomena (Definisi)	Sub-Fenomena	Gejala yang Diamati
Efektivitas guna menilai sejauh mana tujuan peningkatan ekonomi tercapai. Ini terlihat dari peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga di kampung tersebut, terutama dari sektor-sektor yang terkait dengan tema.	Pemahaman masyarakat terhadap program	Warga memahami tujuan program pemberdayaan ekonomi dan lingkungan.
		Sosialisasi program dilakukan secara rutin dan melibatkan tokoh masyarakat.
	Pencapaian target program	Terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha tahu tempe setelah program berjalan.
		Infrastruktur pendukung usaha seperti jalan dan fasilitas umum mengalami perbaikan nyata.
	Perubahan nyata dalam ekonomi masyarakat	Pendapatan rata-rata keluarga pelaku usaha meningkat secara signifikan.
		Jumlah lapangan kerja baru yang terkait dengan usaha tahu tempe bertambah.
Efisiensi fokusnya adalah bagaimana sumber daya dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi.	Pengelolaan anggaran program	Dana program digunakan sesuai rencana dan tepat sasaran.
	Pemanfaatan sumber daya manusia	Tidak ditemukan pemborosan atau penggunaan dana yang tidak transparan.
		Tenaga pendamping dan kader lokal aktif dan terlatih dalam mendukung pelaksanaan program.

Fenomena (Definisi)	Sub-Fenomena	Gejala yang Diamati
		Pelatihan keterampilan diberikan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan warga.
	Waktu pelaksanaan program	Kegiatan program berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
		Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan progres program.
Kecukupan menilai apakah sumber daya yang dialokasikan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.	Pemenuhan sarana dan prasarana	Fasilitas produksi tahu tempe seperti alat dan ruang produksi tersedia memadai.
		Infrastruktur pendukung seperti jalan dan saluran air telah diperbaiki sesuai kebutuhan.
	Pelatihan dan pemberdayaan	Warga mendapatkan pelatihan keterampilan produksi dan pemasaran secara lengkap.
		Akses modal usaha diberikan kepada pelaku usaha mikro secara memadai.
	Dukungan sosial dan kelembagaan	Terbentuk kelompok usaha yang solid dan memiliki struktur organisasi jelas.
		Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait terlihat aktif dalam pendampingan.
Perataan artinya program harus memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebar secara adil di seluruh lapisan masyarakat.	Partisipasi seluruh warga	Semua kelompok usia dan gender terlibat dalam kegiatan program.
		Warga dari berbagai RT dan RW ikut serta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan.

Fenomena (Definisi)	Sub-Fenomena	Gejala yang Diamati
	Penyebaran dampak ekonomi	Peningkatan pendapatan dirasakan oleh hampir seluruh keluarga di kampung.
		Usaha mikro tersebar merata di berbagai wilayah kampung tanpa terkonsentrasi di satu area.
	Akses terhadap fasilitas dan pelatihan	Fasilitas produksi dan pelatihan mudah diakses oleh seluruh warga tanpa diskriminasi.
		Informasi program dan peluang usaha tersosialisasi secara merata ke seluruh lapisan warga.
Responsivitas artinya kemampuan program untuk cepat menyesuaikan diri dengan dinamika pasar.	Kesesuaian tema dengan potensi lokal	Tema tahu tempe sesuai dengan tradisi dan keahlian warga setempat.
		Program mengakomodasi kebutuhan spesifik warga dalam pengembangan usaha tahu tempe.
	Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Warga aktif memberikan masukan dan berperan dalam perencanaan kegiatan program.
		Aspirasi masyarakat terkait pemasaran dan peningkatan kualitas produk diperhatikan.
	Fleksibilitas pelaksanaan program	Program mampu menyesuaikan kegiatan dengan kondisi sosial dan ekonomi warga secara dinamis.
		Penyesuaian strategi dilakukan saat

Fenomena (Definisi)	Sub-Fenomena	Gejala yang Diamati
		menghadapi tantangan seperti pandemi atau perubahan pasar.
Ketepatan mengacu pada relevansi strategi program dengan tujuan peningkatan ekonomi.	Keselarasan antara rencana dan pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama masyarakat.
		Hasil pelaksanaan memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
	Ketepatan sasaran penerima manfaat	Program menysasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti pelaku usaha mikro.
		Penerima manfaat menerima dukungan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
	Ketepatan waktu pelaksanaan	Jadwal kegiatan dipatuhi tanpa banyak penundaan.
		Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan tepat waktu untuk perbaikan program.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah upaya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait topik yang akan diteliti. Proses ini melibatkan langkah-langkah sistematis, mulai dari menghimpun data, analisis data, hingga pengambilan kesimpulan, dengan pendekatan ilmiah yang mencakup rasional, empiris, dan obyektif.

Metode ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan atau fenomena.

Creswell (2014) mendefinisikan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memaknai masalah sosial atau manusia. Penelitian ini melibatkan serangkaian proses, yang mencakup penyusunan pertanyaan dan prosedur yang relevan, pengumpulan data dari partisipan, serta analisis data secara induktif.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dengan penelitian kualitatif, maka dapat menjelaskan fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif dan kontekstual. Selain data lapangan, dalam penelitian ini juga dikembangkan data-data pendukung yang diperoleh dari tinjauan literatur jurnal atau artikel ilmiah yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.2 Situs Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam proses pencarian data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian harus sesuai karena akan mempengaruhi data yang diperoleh serta relevansinya dengan hasil penelitian. Lokasi penelitian harus mudah untuk diakses oleh peneliti, sehingga tidak menghambat proses pengumpulan data penelitian. Peneliti juga harus mengidentifikasi lokasi penelitian harus memiliki ketersediaan data yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah di Kampung Tematik Tahu Tempe Gumregah, wilayah RW 7, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena terdapat kampung tersebut adalah salah satu kampung tematik yang ditetapkan sejak awal program kampung tematik ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang yaitu sejak 2016 dan dapat dijadikan salah satu sumber informasi yang valid bagi penelitian ini.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian adalah seseorang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang akan digali oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana subjek dipilih secara sengaja karena dianggap memberikan informasi yang relevan dan penting untuk penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu dari Bappeda Kota Semarang, Kepala Kelurahan Lamper Tengah, Ketua RW 07, Pengrajin Tahu Tempe di wilayah RW 7, dan masyarakat setempat.

1.7.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2017), jenis data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau dapat diukur secara numerik. Data ini mencakup informasi yang dapat

dihitung dan dianalisis menggunakan statistik. Data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam bentuk numerik, seperti jumlah, frekuensi, atau persentase. Contohnya adalah data jumlah penduduk, tingkat pendidikan, atau hasil tes.

2. Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk deskripsi atau kata-kata, bukan angka. Data ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menggambarkan karakteristik, kualitas, atau proses dari fenomena yang diteliti. Data kualitatif biasanya diperoleh melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi, dan lebih berfokus pada pemahaman konteks dan makna dari perspektif subjek penelitian.

Kemudian, dalam penelitian ini, menggunakan jenis data kualitatif yang berupa hasil wawancara dan observasi lapangan peneliti.

1.7.5 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017), sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Sumber Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, yaitu dari subjek penelitian atau partisipan yang terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Data ini dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau teknik pengumpulan data lainnya. Sumber data primer dianggap lebih otentik karena berasal langsung dari pengalaman atau pendapat subjek penelitian. Data utama dalam

penelitian ini diperoleh dari Bappeda Kota Semarang, Kepala Kelurahan Lamper Tengah, Ketua RW 07, Pengrajin Tahu Tempe di wilayah RW 7, dan PKK RT 1-8.

2. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak kedua atau dari dokumen dan materi yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder biasanya diambil dari hasil penelitian, laporan, buku, artikel jurnal, statistik, atau arsip yang disediakan oleh pihak lain. Sumber data ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer atau sebagai bahan perbandingan.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang selanjutnya didukung oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena, pengalaman, atau makna yang dihasilkan dari interaksi manusia. Data yang dikumpulkan biasanya bersifat deskriptif dan naratif. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik di mana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti untuk mengamati perilaku, aktivitas, atau kejadian yang sedang berlangsung. Peneliti berperan sebagai "partisipan" untuk memahami situasi sosial dari dalam. Observasi memungkinkan

peneliti untuk mengalami fenomena yang sedang diteliti, bukan sekadar mengamati dari luar. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan detail mengenai konteks sosial atau budaya.

2. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi lebih jauh mengenai pengalaman, pandangan, atau perasaan responden. Dalam penelitian kualitatif, wawancara ini cenderung bersifat tidak terstruktur atau semi-terstruktur, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi sesuai dengan arah pembicaraan yang berkembang. Menurut Esterberg (2002), wawancara mendalam memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memahami fenomena secara subjektif dari sudut pandang responden. Kvale dan Brinkmann (2009) menegaskan bahwa wawancara ini cocok untuk penelitian yang ingin memahami pengalaman hidup, sikap, dan perspektif individu secara mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang menggunakan berbagai sumber tertulis atau rekaman (seperti buku, artikel, surat, foto, video, dan arsip) yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini sering digunakan untuk melengkapi data yang didapatkan dari wawancara atau observasi. Bowen

(2009) menjelaskan bahwa dokumen-dokumen bisa memberikan data yang kaya dan beragam karena mampu memberikan perspektif historis, konteks sosial, dan fakta yang mungkin tidak terungkap dari metode lainnya. Yin (2018) menambahkan bahwa dokumen memberikan verifikasi atau bukti tambahan terhadap data lain dalam penelitian kualitatif.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan cara untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan mengolah data yang telah dikumpulkan selama penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang bersifat deskriptif dan non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2011) analisis data kualitatif adalah proses yang dinamis dan interaktif, di mana peneliti terus-menerus melakukan analisis, pengumpulan data, dan penginterpretasian secara bersamaan.

Matthew B. Miles dan Michael Huberman (dalam Sugiyono, 2016) mengemukakan beberapa langkah dalam menganalisis data, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses awal dalam analisis data, di mana data yang sangat banyak dan kompleks disaring, dipilih, dan disederhanakan agar lebih fokus dan terorganisir sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mengurangi data

yang tidak relevan atau berlebihan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi tema-tema atau pola yang signifikan. Proses ini membantu peneliti untuk menyaring informasi yang penting dari informasi yang tidak relevan atau redundan.

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah proses menyusun dan mengorganisir data yang telah direduksi agar mudah dipahami, dianalisis, dan ditarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menggambarkan temuan-temuan yang muncul dari analisis dengan cara yang sistematis, jelas, dan mudah dimengerti. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data lebih mengarah pada pengorganisasian informasi dalam bentuk narasi atau deskripsi yang memaparkan pola atau tema yang ditemukan dari data yang telah dikumpulkan.

3. Verifikasi

Verifikasi Data dalam konteks penelitian kualitatif adalah proses untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dan dianalisis adalah valid, akurat, dan dapat dipercaya. Verifikasi data bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas temuan penelitian dengan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas dan tidak bias. Dalam penelitian kualitatif, verifikasi sering kali melibatkan pengecekan ulang terhadap data

dan proses analisis untuk memastikan temuan yang dihasilkan adalah representasi yang sah dari fenomena yang diteliti.

1.7.8 Kualitas Data

Untuk mengetahui nilai keabsahan suatu data penelitian maka diperlukan akurasi data dari berbagai sudut pandang. Moelong (2007) mengemukakan Teknik untuk meningkatkan keabsahan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan Teknik triangulasi. Triangulasi adalah salah satu cara utama untuk memastikan keabsahan dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data (misalnya, wawancara, observasi, dan dokumen), metode (misalnya, wawancara mendalam dan survei), teori (menggunakan lebih dari satu teori untuk menganalisis data), atau peneliti (melibatkan lebih dari satu peneliti untuk menganalisis data). Hal ini membantu memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh bias atau pandangan tunggal.

Kemudian menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2016), menjabarkan beberapa macam Teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber, ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memverifikasi temuan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh dari satu sumber dapat diperkuat atau dikonfirmasi oleh sumber data lain.
2. Triangulasi metode, ini melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk mengeksplorasi fenomena yang sama. Hal ini bertujuan untuk memeriksa temuan dari berbagai perspektif

dan untuk memastikan bahwa hasilnya bukanlah hasil dari keterbatasan metode tunggal.

3. Triangulasi teori, ini melibatkan penerapan berbagai teori atau kerangka pemikiran untuk menganalisis data yang sama. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena dari berbagai sudut pandang teoretis dan memberikan kedalaman lebih dalam analisis.
4. Triangulasi peneliti, ini melibatkan penggunaan lebih dari satu peneliti dalam pengumpulan dan analisis data untuk meminimalkan bias yang mungkin timbul dari pandangan pribadi peneliti. Dengan melibatkan beberapa peneliti, hasil penelitian dapat lebih objektif dan mengurangi potensi kesalahan interpretasi.
5. Triangulasi waktu melibatkan pengumpulan data pada berbagai waktu atau periode untuk melihat apakah temuan yang diperoleh tetap konsisten. Ini sangat berguna untuk menganalisis perubahan atau dinamika dalam waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik triangulasi sumber dan metode, dimana sumber data yang dikumpulkan melalui beberapa sumber dan menggunakan beberapa metode yaitu wawancara dan observasi lapangan, serta dilengkapi dengan hasil dokumentasi.